

ABSTRAK

PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK MELALUI RESES DPRD TANGGAMUS DALAM PERSPEKTIF MODEL DEMOKRATIS PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Oleh

REYNALDI ABDITIO

Penelitian ini membahas perumusan kebijakan publik melalui reses DPRD Kabupaten Tanggamus dalam perspektif Model Demokrasi Thomas R. Dye pada perencanaan pembangunan daerah. Latar belakang penelitian ini adalah masih belum optimalnya tindak lanjut aspirasi masyarakat hasil reses ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perumusan kebijakan publik melalui reses DPRD, serta menganalisisnya berdasarkan empat indikator dalam Model Demokrasi Thomas R. Dye, yaitu elaborasi, akomodasi, konstituen, dan partisipasi aktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses umumnya masih bersifat praktis, seperti perbaikan infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, dan bantuan sosial. Aspirasi tersebut kemudian diinventarisasi, dikelompokkan, dan diolah menjadi pokok-pokok pikiran DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam perencanaan pembangunan. Namun, proses akomodasi masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan daerah. Dari sisi partisipasi, masyarakat sudah cukup aktif hadir dan menyampaikan aspirasi, tetapi belum sepenuhnya terlibat dalam tahap pembahasan lanjutan. Dengan demikian, reses DPRD Kabupaten Tanggamus telah berfungsi sebagai sarana penting dalam penyerapan aspirasi masyarakat, tetapi belum seluruhnya efektif dalam menjembatani aspirasi tersebut ke dalam kebijakan pembangunan daerah.

Kata Kunci: Reses DPRD, Formulasi Kebijakan, Aspirasi Masyarakat

ABSTRACT

PUBLIC POLICY FORMULATION FROM THE TANGGAMUS REGIONAL LEGISLATIVE COUNCIL'S RECESS SESSION FROM THE PERSPECTIVE OF A DEMOCRATIC MODEL IN DEVELOPMENT PLANNING

By

REYNALDI ABDITIO

This study examines the formulation of public policy through the Tanggamus Regency DPRD's recess sessions from the perspective of Thomas R. Dye's Model of Democracy in regional development planning. The background of this study is the suboptimal incorporation of public aspirations arising from these recess sessions into development planning documents. This study aims to examine the process of public policy formulation through the DPRD recess sessions and to analyze it based on four indicators in Thomas R. Dye's Democracy Model: elaboration, accommodation, constituency, and active participation. This study employs a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results indicate that public aspirations conveyed during recess sessions are generally practical in nature, such as infrastructure improvements, public services, health, and social assistance. These aspirations are then inventoried, categorized, and processed into key points for the Regional People's Representative Council (DPRD) to be further discussed in development planning. However, the accommodation process still faces constraints due to budget limitations and regional development priorities. In terms of participation, the public has been quite active in attending and voicing their aspirations, but has not been fully involved in the subsequent discussion stages. Thus, the Tanggamus Regency DPRD recess sessions have functioned as an important means of gathering public aspirations, but have not been entirely effective in bridging those aspirations into regional development policies.

Keywords: *DPRD recess, policy formulation, community aspiration*